



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

**ISTERI**, NIK ..., lahir di AAA tanggal 21 September 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun BBB, Gampong AAA, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Penggugat;**

L a w a n

**SUAMI**, NIK ..., lahir di CCC tanggal 12 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kernet mobil, bertempat tinggal di Dusun BBB, Gampong AAA, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2014 tanggal ... 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 tahun yang beralamat di Gampong AAA, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 15 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, NIK ..., diasuh oleh ibu;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 7 (tujuh) tahun saja, karena sejak tanggal 18 November 2021, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- 2) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup terhadap Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 November 2021, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan namun tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan aparat gampong, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong AAA Nomor .../2024 tanggal 28 Januari 2024, memohon kepada bapak Majelis Hakim untuk berperkar secara cuma-cuma;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menunjuk Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang dan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-*nazegeben* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2014 tanggal ... 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (sekarang Aceh Barat Daya), telah di-*nazegeben* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong AAA, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan saksi mengetahui pernikahan mereka;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun BBB, yang berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Saksi;
  - Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini yang Saksi lihat harmonis, rukun dan damai. Tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran antara mereka;
  - Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, dalam pertengkaran tersebut, Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering membanting barang-barang perabotan rumah tangga kalau terjadi pertengkaran;
  - Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu adalah karena faktor ekonomi. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Ketika diminta, Tergugat langsung marah-marah;
  - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Pihak keluarga kedua belah pihak, sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat dan berhasil. Tetapi, tidak lama kemudian, kembali terjadi pertengkaran;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honor, bertempat tinggal di Gampong DDD, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai keponakan Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di BBB dan Saksi hampir tiap hari mampir ke sana untuk menjenguk orang tua Penggugat, yang merupakan nenek Saksi;
- Selama ini, Saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, beberapa waktu ke belakang, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Saksi sering melihat adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga berani melakukan pemukulan kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat masalah nafkah yang kurang. Selain itu, Tergugat juga sering tiba-tiba marah tidak jelas. Bahkan, di depan orang lain pun, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah 2 (Dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pertama kali upaya damai tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat gampong. Saat itu Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai, namun tidak lama kemudian kembali terjadi pertengkaran. Sedangkan upaya damai yang kedua kalinya dilaksanakan di kantor urusan agama setempat, tetapi pertengkaran tetap kembali terjadi;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

*Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan November 2021, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 November 2021 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dalam persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan sah menurut hukum. Oleh karenanya, perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan selanjutnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat berdomisili di wilayah Gampong AAA Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat sudah pernah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan di luar hadir Tergugat, dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 76/KMS.W1-A21/HK2.6/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTERI**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadir Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)